

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Analisis Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kepulauan Nias: mediasi belanja modal telah dibuktikan secara empiris oleh Sinaga *et al.* (2023) di kepulauan Nias. Dengan teknik analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PAD dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, belanja modal ditemukan mampu memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal juga mampu memediasi pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, disisi lain belanja modal tidak memediasi pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berimplikasi pada perumusan kebijakan peningkatan PAD, penentuan alokasi belanja modal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.

Penelitian yang dilakukan Irvan *et al.* (2020) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dengan analisis jalur sebagai teknik analisis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Wiraswasta *et al.* (2018) menggunakan teknik analisis jalur dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kota dalam wilayah Jawa Timur (tahun 2009-2014). Hasil menunjukkan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti secara positif dan signifikan. Dana perimbangan dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, ataupun tidak langsung melalui mediasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ningsih dan Noviaty (2019) menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi

Sumatera Selatan 2014-2018. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka ditemukan hasil penelitian bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa, apabila terjadi peningkatann PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya terjadinya pertambahan Dana Perimbangan menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening dibuktikan secara empiris oleh Ernita *et al.* (2020) di Provinsi Jambi. Hasil penelitian yang menggunakan analisis jalur menunjukkan bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2008-2017 secara langsung adalah efek positif karena dibuktikan dengan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,603 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi pada 2008-2017. Pengaruh langsung Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi pada tahun 2008-2017

adalah efek negatif yang dibuktikan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) -0.77794 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki efek negatif. tentang Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi pada 2008 -2017. Efek langsung Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah $0,603$, sedangkan efek tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengeluaran Modal (Z) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah $- 0,1202$. Ini berarti bahwa efek langsung > efek tidak langsung ($0,603 > - 0,1202$).

Selain itu, dalam penelitian Irvan dan Karmini (2016) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian-penelitian tersebut telah membuktikan bahwa ada dan tidaknya pengaruh dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai mediasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel independen kedua dan Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian.

B. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan antara dua pihak, prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Lebih khusus lagi, teori ini meneliti hubungan dari perilaku dan perpektif struktural (Ulum *et al.*, 2021). Prinsipal merupakan pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai, namun tidak memiliki informasi atau keterampilan yang cukup untuk mencapainya secara langsung. Prinsipal sering kali mempercayakan sebagian tanggung jawab tersebut kepada agen. Agen merupakan pihak yang bertindak atas nama prinsipal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Agen memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori ini menyatakan bahwa jika diberi kesempatan, maka agen akan berperilaku mementingkan diri sendiri, perilaku yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dengan demikian, prinsipal akan memberlakukan mekanisme struktural yang memantau agen untuk mengekang perilaku oportunistik dan lebih baik menyelaraskan kepentingan para pihak.

Agen dilibatkan oleh prinsipal dalam melakukan beberapa tanggung jawab dalam bentuk perjanjian. Teori keagenan bertujuan untuk mengansalisis pengaturan perjanjian antara dua orang atau lebih, organisasi atau kelompok. Sektor publik negara dapat diterapkan dengan teori keagenan. Teori keagenan digambarkan dengan interkasi keagenan

antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat selaku prinsipal dan daerah selaku agen. Di satu sisi pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas pemerintah pusat yang menyerahkan kekuasaan, di sisi lain pemerintah daerah juga harus memperhatikan kesejahteraannya sendiri. Penerapan teori agensi dalam konteks ini membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen, untuk mencapai tujuan bersama yang dapat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat.

Teori Keynes (*Keynesian Theory*)

Teori Keynesian berasal dari pemikiran John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi Inggris, yang memperkenalkan teori ini dalam bukunya "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" (1936). Teori ini lahir sebagai respon terhadap kemunduran ekonomi diseluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan Amerika Serikat dalam tahun 1929-1932. Periode itu dinamakan *the Great Depression*. Ekonomi klasik percaya bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangan secara otomatis, perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan kerja penuh dan perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan. Namun Keynes menolak pandangan tersebut, dalam teorinya ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan kerja penuh. Menurutnya yang sebaliknya lah yang selalu berlaku, yaitu:

perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku.

Penekanan utama dalam teori Keynes dalam buku Sukirno (2015) terletak pada peran aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian, khususnya melalui pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong permintaan agregat. Beberapa pokok penekanan dari teori Keynes diantaranya yang pertama permintaan agregat. Permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi (penanaman modal), belanja atau pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor adalah faktor utama yang menentukan tingkat output dan lapangan kerja dalam suatu perekonomian. Jika permintaan agregat rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan melambat, bahkan meskipun potensi produksi tinggi.

Kedua Intervensi pemerintah, menurut Keynes dalam kondisi resesi, pemerintah harus ikut campur melalui kebijakan fiskal seperti menaikkan belanja publik atau menurunkan pajak. Hal ini bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan mendorong pertumbuhan.

Ketiga belanja pemerintah, yang memiliki efek multiplier terhadap ekonomi. Artinya, setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menciptakan efek berantai terhadap pendapatan masyarakat, konsumsi, dan investasi, yang semuanya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pentingnya alokasi belanja yang produktif dan efektif juga mampu

mengoptimalkan belanja pemerintah untuk program-program yang mendorong efek multiplier terhadap perekonomian.

Keempat jangka pendek lebih penting daripada jangka panjang. Analisis Keynes merupakan suatu analisis jangka pendek, berarti analisisnya memisalkan bahwa jumlah maupun kemampuan dari faktor-faktor produksi tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, apabila kegiatan ekonomi bertambah tinggi dan lebih banyak faktor-faktor produksi digunakan, pengangguran tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya akan berkurang.

Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam kondisi ekonomi lesu.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Pasal 1 angka 20 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada pasal 3 angka 2 dijelaskan bahwa dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Dana perimbangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mendukung

pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang mungkin memiliki pendapatan atau kemampuan fiskal yang lebih rendah.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Masing-masing komponen Dana Perimbangan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, diantaranya DBH berfungsi untuk memberikan kompensasi kepada daerah atas kontribusi mereka terhadap pendapatan Negara dengan tujuan untuk memotivasi daerah dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, DAU berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembiayaan rutin pemerintahan daerah dari pendapatan yang diterima pemerintah pusat yang tujuannya untuk memastikan adanya pemerataan dalam alokasi dana antara daerah yang lebih kaya dan kurang kaya, sehingga setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik, dan DAK berfungsi untuk mendanai proyek atau kegiatan tertentu yang bersifat khusus dan memiliki prioritas nasional atau daerah dengan tujuan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki pengaruh besar pada pembangunan regional dan untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang memiliki kebutuhan khusus dapat menerima bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur.

Secara keseluruhan, ketiga komponen dana perimbangan merupakan satu kesatuan utuh yang bekerja bersama untuk mendukung pembangunan yang adil dan merata, memperbaiki kualitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Di berbagai negara, dana perimbangan menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana ini biasanya dialokasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti: jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang serta mengurangi disparitas atau perbedaan antara wilayah-wilayah yang lebih kaya dan yang lebih miskin di suatu negara.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2004:4) Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan

perbandingan output atau input yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan yang meliputi pendapatan daerah, belanja pemerintah, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan output adalah hasil kinerja yang diperoleh dari pengelolaan keuangan tersebut yang meliputi tingkat serapan anggaran, kualitas belanja, kinerja pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pasal 1 angka 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Maka efisiensi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya dengan optimal, sehingga mencapai hasil yang maksimal dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan di wilayah tersebut.

Menurut Hassanah & Anitasari (2019) Efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan atau proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Rumusan efisiensi yang dibahas adalah rasio dari realisasi pengeluaran belanja daerah dengan total pendapatan daerah (Rahman dan Saputra, 2022; Widodo, 1990). Sartika

(2019) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Menurut Halim (2007: 234) Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang penggunaan dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang diatur dalam Undang-undang Nomer 33 Pasal 1 angka 13 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Menurut Kementerian keuangan Republik Indonesia dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Menurut Mangkoesobroto (2016) pada penelitian Nuarini (2023) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Indikator yang digunakan pada belanja modal di BPS adalah Anggaran Belanja Modal yang mencakup alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik dan Realisasi Belanja Modal yang merupakan pengeluaran aktual yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk proyek-proyek pembangunan dan investasi. Data ini memberikan informasi tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja modal yang telah dianggarkan.

Tingginya kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sarana, prasarana dan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Adapun penyediaan sarana, prasarana maupun infrastuktur dilakukan Pemerintah Daerah melalui belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada suatu daerah seharusnya mampu meningkatkan sumber dana melalui PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk akan meningkat pula.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2015). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat kemampuan yang ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya, investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang, disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu ekonomi berkembang.

Indikator utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan indikator lainnya terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang biasa dihitung dalam kurun waktu satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan pendapatan riil dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa cepat atau lambat suatu negara mengalami peningkatan dalam produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah dalam periode tertentu, nilainya dihitung dengan membagi PNB dan PDB harga yang berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Pengangguran

adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Kemiskinan adalah kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. IPM adalah indeks untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia yang diukur berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan secara ekonomi.

PDRB dapat dibagi menjadi dua versi perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Wauran, 2018).

Input utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian yang menghasilkan output berupa pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri pengolahan menjadi penopang utama PDRB Jawa Timur dengan kontribusi signifikan dari industri makanan dan minuman serta industri tembakau. Sektor

perdagangan memiliki angka pengganda yang besar terhadap output yang dihasilkan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian juga merupakan sektor penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan berbagai perkembangan lainnya (Sukirno, 2002). Tetapi adalah sungkar untuk memberi gambaran tentang berbagai perkembangan tersebut untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi yang dicapai sesuatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Alat pengamat prestasi kegiatan suatu perekonomian yang terutama adalah pendapatan nasional, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, tingkat perubahan harga-harga, dan neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.

Sukirno (2002) menyatakan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi antara lain:

- a. Tanah dan Kekayaan Alam lainnya
- b. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja
- c. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi
- d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

C. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang variabel yang akan diuji kebenarannya secara empiris. Adapun hipotesis yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari perspektif teori agensi dapat dipertimbangkan bahwa pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan dana kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk melaksanakan program-program tertentu atau untuk membiayai pembangunan di tingkat lokal. Konflik kepentingan dapat timbul karena pemerintah daerah mungkin memiliki insentif untuk menggunakan dana perimbangan yang tidak efisien atau tidak tepat sasaran, sementara pemerintah pusat ingin memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irvan *et al.* (2020) dan Wiraswasta *et al.* (2018) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya, Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, maka semakin besar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Chandra *et al.* (2017) bahwa dana perimbangan secara nyata telah berpengaruh baik dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Chandra, 2017). Realisasi Dana Perimbangan yang memberikan gambaran tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana perimbangan yang telah diterima, dan penerimaan dana perimbangan di tiap daerah yang mencakup informasi tentang jumlah dana yang diterima, serta perincian penerimaan berdasarkan jenis dana perimbangan.

Berdasarkan dari sumber penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

H1: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori agensi dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan pemerintah pusat sebagai prinsipal. Hal ini diterapkan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah sebagai agen mampu mengelola keuangan daerah secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Teori ini memperhatikan pentingnya mengatur insentif (sesuatu yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu) agar kepentingan pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika insentif bagi pemerintah daerah diatur sedemikian rupa sehingga mereka cenderung mengalokasikan anggaran secara efisien, memprioritaskan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan mengurangi pemborosan.

Ini menekankan pentingnya mekanisme monitoring dan pengawasan untuk mengurangi risiko perilaku agen yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam hal ini, efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Nurulita (2018) dan Astuti (2015) menunjukkan bahwa secara langsung, terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Artinya, semakin efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah maka pertumbuhan ekonomi ikut meningkat.

Berdasarkan dari sumber penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

H2: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai mediasi

Penerapan teori agensi ini mengacu pada hubungan antara pemberi dan penerima dana, di mana pemberi dana memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan secara efektif oleh penerima untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teori ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah Jawa Timur untuk memastikan bahwa dana perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur digunakan dengan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal adalah investasi dalam pembelian atau pengembangan aset jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Belanja modal bisa menjadi perantara antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berarti, dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur digunakan untuk meningkatkan belanja modal, yang pada gilirannya diharapkan akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Dari perspektif teori Keynes, peran aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian sangat penting, terutama melalui instrumen belanja pemerintah, termasuk belanja modal. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong permintaan agregat dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan merupakan bentuk intervensi fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dana ini memungkinkan daerah untuk meningkatkan belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat dirasakan langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin besar dan tepat sasaran alokasi belanja modal, maka semakin besar pula potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini ditegaskan oleh penelitian Sinaga *et al.* (2023) dan Wiraswasta *et al.* (2018) yang menunjukkan Dana perimbangan

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Akumulasi modal yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dapat dipengaruhi oleh dana perimbangan yang merupakan salah satu modal pembangunan. Sehingga dari model ini dapat di konstruksikan bahwa belanja modal dapat menjadi variabel intervening antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan dari sumber penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

H3: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai mediasi.

4. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal sebagai mediasi

Pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola keuangan daerah, termasuk alokasi anggaran untuk berbagai keperluan, termasuk belanja modal. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami dari perspektif teori agensi sebagai sejauh mana pemerintah daerah mengelola anggaran dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Masyarakat sebagai prinsipal, memiliki kepentingan dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah karena mereka adalah pemilik

dana publik yaitu pajak, yang diinvestasikan oleh pemerintah daerah. Dari perspektif teori agensi, masyarakat membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan dana publik digunakan secara optimal dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat lalu pertumbuhan ekonomi ikut terpengaruhi.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah juga sejalan dengan teori Keynes, yang menekankan pentingnya alokasi belanja yang produktif dan efektif. Pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan secara efisien akan dapat mengoptimalkan belanja modal untuk program-program yang mendorong efek multiplier terhadap perekonomian. Dengan demikian, belanja modal berperan sebagai mekanisme transmisi antara kebijakan fiskal dan tujuan akhir berupa pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bagaimana belanja publik yang didanai dan dikelola secara efisien dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Sinaga *et al.* (2023) dapat memperkuat penjelasan diatas bahwa Belanja modal mampu memediasi pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Artinya, belanja modal mampu memperkuat pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat menghindari pemborosan

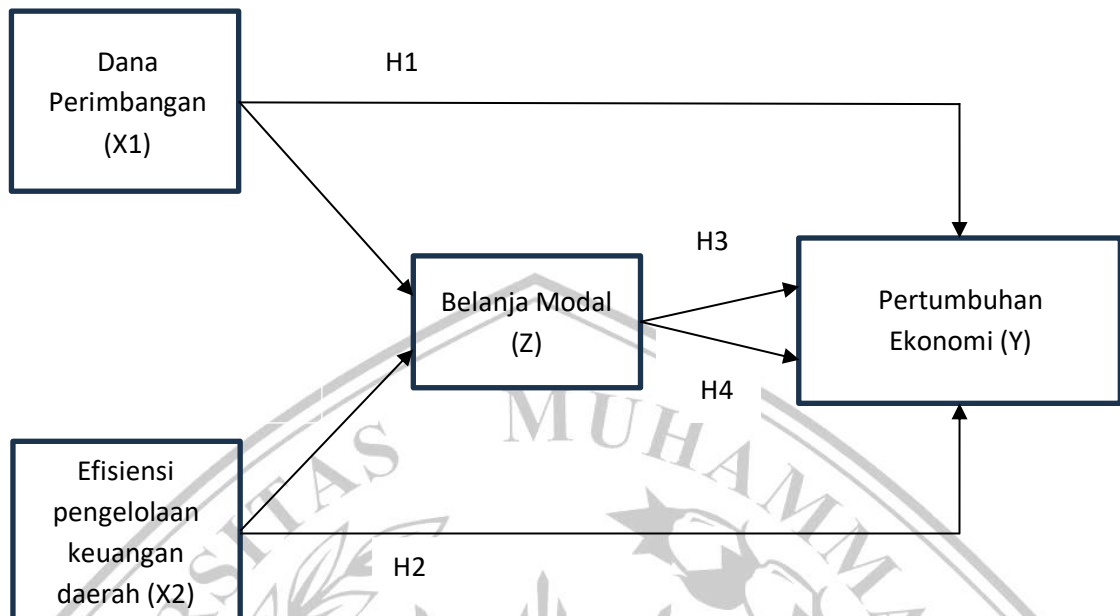
anggaran. Dana yang diperoleh dari penghematan anggaran dapat dialokasikan untuk menambah belanja modal, sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan dari sumber penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu:

H4: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur melalui Belanja Modal sebagai mediasi.



D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X1 : Dana Perimbangan

X2 : Efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Y : Pertumbuhan Ekonomi

Z : Belanja Modal